



ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PERAN ELIT POLITIK DALAM PROSES PEMEKARAN KABUPATEN KEPULAUAN OBI

Djono Muin¹, Juma Luange²

Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara

Email: djonomuin@gmail.com¹, jumaluange43@gmail.com²

ABSTRAK

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antarmanusia. Robert M. McIver mengatakan: “Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*Society means a system of ordered relations*).” Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geograis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga -lembaga yang kira-kira sama. Elite politik adalah individu yang memiliki banyak kekuasaan politik dibandingkan dengan yang lain. Yang dimaksud kekuasaan adalah; kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain, dan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi perbuatan keputusan kolektif. Mobilitas vertikal politik masyarakat Kepulauan Obi sangat dominan oleh kelompok kepentingan, seperti elit lokal, pengusaha, aktivitis, politisi, birokrat, aktivitis LSM dan media lokal dalam menyuarakan isu - isu perubahan politik dan pembangunan sehingga Kepulauan Obi menjadi salah satu sentral dalam otonomi daerah untuk proses pemekaran yang sesuai dengan regulasi, dari aspek luas wilayah secara administratif penduduk dari sisi studi kelayakan secara politik sangat memenuhi syarat.

Menurut Sugiyono (2017) “Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah. Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi merupakan dorongan atau upaya masyarakat dalam meningkatkan kualitas kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat dan pemeratan infrastruktur pembangunan yang belum memadai dan rentan kendali birokrasi yang lebih pendek. Keinginan kolektif dari masyarakat memberikan legitimasi dasar bagi wacana pembentukan daerah otonom baru. Tanpa aspirasi dari akar rumput, inisatif pemekaran mungkin tidak muncul atau sulit dijustifikasi secara moral dan politis.

Kata Kunci : Masyarakat, Elit politik dalam proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi.

ABSTRACT

Society is the whole of human relationships. Robert M. McIver said: “Society is a system of relationships arranged (Society means a system of ordered relations). ”Usually members of a society inhabit a geographical area that has roughly the same cultures and



institutions. Political elites are individuals who wield greater political power than others. Power is defined as the ability to influence others and the ability to influence collective decision-making. The vertical political mobility of the Obi Islands community is very dominant by interest groups, such as local elites, businessmen, activists, politicians, bureaucrats, NGO activists and local media in voicing issues of political change and development so that the Obi Islands become one of the centers in regional autonomy for the expansion process in accordance with regulations, from the aspect of the area of administrative population from the political feasibility study side it is very qualified.

According to Sugiyono (2017) "Literature studies are related to theoretical studies and other references related to values, culture and norms that develop in the social situation being studied, besides that, literature studies are very important in conducting research, this is because research cannot be separated from scientific literature. From the discussion above, it can be concluded that the process of expanding the Obi Islands Regency represents a community effort to improve the quality of public services and equitable development infrastructure, which is inadequate and vulnerable to shorter bureaucratic controls. The collective will of the community provides the basic legitimacy for the discourse on establishing a new autonomous region. Without grassroots aspirations, the expansion initiative might not have emerged or would have been difficult to justify morally and politically.

Keywords: *Society, Political elite in the process of expansion of Obi Islands Regency.*

1. Pendahuluan

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan Pada tahun 2021, Kecamatan Obi memiliki 9 kepala desa. Terdapat aparatur desa yaitu dari sekretariat desa sebanyak 35 orang, pelaksana teknis sebanyak 29 orang, pelaksana kewilayahan sebanyak 43 orang, dan pegawai desa lainnya sebanyak 9 orang.

Data jumlah penduduk bersumber dari hasil registrasi penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk disuatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Jumlah Penduduk Kecamatan Obi pada tahun 2023 sebanyak 18.067 jiwa. Sebanyak 9.280 jiwa laki-laki dan 8.787 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin 105,61. Desa yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi adalah



Desa Baru sedangkan yang terendah adalah Desa Buton Dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Obi, Desa Buton adalah desa dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 115,04 jiwa per km², yang terkecil adalah Desa Baru dengan kepadatan 7,06 jiwa per km². BPS Kabupaten Halmahera Selatan, 2024. Kecamatan Obi Dalam Angka 2024 ISSN : No Publikasi : 82040.24012.

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antarmanusia. Robert M. McIver mengatakan: “Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*Society means a system of ordered relations*).” Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geograis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga - lembaga yang kira-kira sama. Masyarakat dapat menunjuk pada masyarakat kecil, misalnya, masyarakat kelompok etnis Batak di Sumatera Utara, atau suatu masyarakat yang lebih luas nation state seperti masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat seperti ini anggota masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain karena faktor budaya dan faktor agama, dan/atau etnis.

Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok - kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain; disatu pihak ia ingin kerja sama, dipihak lain ia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia.

Manusia mempunyai naluri (instinct) untuk hidup bersama dengan orang lain secara harmonis. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhinya seorang diri, maka ia bekerja sama untuk mencapai beberapa nilai (value). Ia perlu makan, minum, berkeluarga dan bergerak secara aman, dan sebagainya. Untuk memenuhi keperluan - keperluan dan kepentingan - kepentingan itu ia mengadakan hubungan dan interaksi dengan orang lain dengan jalan mengorganisir bermacam - macam kelompok dan asosiasi. Kelompok yang paling pokok ialah keluarga, tetapi masih banyak asosiasi lain yang memenuhi bermacam-macam kebutuhan manusia. Misalnya, untuk mengejar kepentingannya di bidang ekonomi didirikan asosiasi ekonomi seperti koperasi, perkumpulan perdagangan, perkumpulan nelayan dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan di bidang spiritual diadakan perkumpulan agama, perkumpulan kebatinan, dan sebagainya; untuk memenuhi kebutuhan menambah pengetahuan didirikan sekolah-sekolah, kursus-kursus, dan sebagainya. Miriam Budiardjo, 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. ISBN: 978-979-22-3494-7. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Bagaimana Elite politik tetap berkuasa? Kelompok populis menekankan konflik berkelanjutan antara warga negara dan Elite politik. Sejauh mana individu atau keluarga yang sama mengontrol kekuasaan politik dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan politik. Beberapa ciri demokrasi memungkinkan Elite bertahan, tetapi kualitas politik sangat bervariasi sepanjang waktu dan geografi. Keuntungan petahana dalam pemilihan dan promosi, yang terkadang dapat dialihkan ke hubungan keluarga, dapat melanggengkan ketidaksetaraan politik dalam demokrasi. Elite politik sebagai aktor sentral, seperti dinasti politik. Ketidaksetaraan politik didefinisikan sebagai sejauh mana individu atau keluarga yang sama memonopoli kekuasaan politik di badan legislatif, Pemerintahan dan Ekonomi.

Ketika ketimpangan politik dan ekonomi meningkat, ada kekhawatiran luas mengenai evolusi seleksi politik dan jika perubahan kepentingan ekonomi perwakilan saat ini merupakan faktor dalam pengambilan keputusan yang demokratis. Rute yang menjanjikan ke



depan berusaha menyelidiki konsentrasi kekuatan politik di antara Elite legislatif atau eksekutif yang sama atau terkait. Pemilih pada setiap perodesasi demokrasi elektoral akan tertarik dengan program wakil rakyat jika menggabungkan aspek 'kualitas politik', seperti seberapa efektif para Elite politik menyelesaikan janji politiknya. Aji Deni, 2024. *Elite Politik, Demokrasi, & Ketimpangan*. ISBN : 978-623-120-437-0. Eureka Media Aksara, Jawa Tengah.

Elite politik adalah individu yang memiliki banyak kekuasaan politik dibandingkan dengan yang lain. Yang dimaksud kekuasaan adalah; kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain, dan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi perbuatan keputusan kolektif. Putnam mengartikan kekuasaan sebagai probabilitas untuk memengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan negara, atau probabilitas untuk memengaruhi alokasi nilai-nilai secara otoritatif.

Dalam kekuasaan politik, terdapat stratifikasi yang menggambarkan tingkat pengaruh seseorang dalam kekuasaan. Putnam menggambarkan dalam sebuah piramid, stratifikasi teratas adalah kelompok pembuat keputusan (*proximate decision makers*). Lapisan ini sebagian besar terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan resmi utama, walaupun tidak selalu mereka. Lapisan kedua di bawahnya adalah kaum berpengaruh (*influentials*) yaitu individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implisit yang kuat, mereka yang dimintai nasihat oleh pembuat keputusan yang kepentingan dan pendapatnya diperhitungkan oleh pembuat keputusan itu. Lapisan kedua terdiri dari para birokrat, tuan tanah, industrialis, bankir, pimpinan kelompok kepentingan, konsultan resmi dan tidak resmi.

Lapisan ketiga terdiri dari warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintah, misalnya sebagai anggota partai, birokrat tingkat menengah, editor surat kabar atau para penulis. Lapisan ini disebut aktivis yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan kaum berpengaruh.

Lapisan keempat terdapat orang-orang yang menganggap kehidupan politik seperti halnya tontonan yang sangat menarik. Mereka disebut publik peminat politik (*attentive public*) ini berbeda dengan sebagian besar warga negara akibat luar biasa besarnya perhatian yang mereka berikan terhadap masalah pemerintahan dan kemasyarakatan. Mereka ini mengetahui pemain terkemuka dalam permainan politik, sekali pun tanpa melihat "angka kemenangan" yang diperoleh masing-masing pemain, dan mereka hanya mendiskusikan jalannya permainan dan strateginya dan jarang sekali terjun ke lapangan.

Lapisan kelima adalah kaum pemilih (*voters*). Kaum pemilih ini memiliki satu sumber politik kolektif penting, yaitu jumlahnya sangat besar, tetapi sebagai individu mereka tidak memiliki pengaruh sama sekali. Lapisan keenam adalah yang dalam pengertian politik hanya menjadi objek politik, dan bukan aktor yaitu non-partisan. Mereka tidak berafiliasi dan tidak memiliki pengaruh politik. Abdul Chalik, 2017. *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*, ISBN: 978-602-229-766-6. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Salah satu topik sentral pasca reformasi yang menjadi perdebatan adalah mengenai permasalahan otonomi daerah di berbagai tempat baik dalam proses pembentukannya maupun pelaksanaannya. Salah satu dampak dari otonomi daerah adalah adanya aspirasi dari masyarakat tentang pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi melalui upaya terhadap pemerintah baik di daerah maupun di pusat sehingga dari periode pergantian kepala daerah dan pergantian



elit belum ada realisasi politik mengenai pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi. Oleh sebab itu, dinamika otonomi daerah melalui pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi bahwa cita - cita dan perjuangan aspirasi masyarakat Kepulauan Obi sudah 17 tahun, sejak deklarasi DOB Obi pada 27 Januari 2009. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan dukungan pemerintah daerah bukan sekedar persepsi politik atau komunikasi politik saja tetapi dibutuhkan keseriusan kebijakan dari pemerintah daerah untuk proses pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi. Dampak politik lambatnya proses pemekaran kabupaten Kepulauan Obi adalah implementasi kebijakan atau akses terhadap pelayanan masyarakat masih menjadi problem dimana dinamika masyarakat harus mengeluarkan Anggaran yang begitu signifikan dari desa ke kabupaten untuk mendapatkan berbagai akses terhadap pelayanan, seperti akses terhadap pelayanan kependudukan, kesehatan, dan pendidikan, hal ini menjadi cerminan terhadap pemerintah daerah, stakeholder (pemangku kepentingan) atau elit politik sehingga dukungan politik *will* bukan sekedar wacana atau dengar pendapat tetapi dukungan moralitas politik sangat dibutuhkan untuk memperjuangkan nilai - nilai politik dalam proses pemekaran Daerah Otonomi Baru.

Timer Jaap (2007) mengungkapkan pemekaran sebagai proses “pemecahan kekuasaan” akhirnya mengarah pada konstetasi para pejabat - pejabat lokal untuk mengakui tuntutan-tuntutan lokal untuk menjadi tuan diatas tanahnya sendiri, didalam penjelasan tersebut bahwa proses pemekaran suatu wilayah menjadi sebuah pertarungan elit lokal untuk menguasai apa yang diinginkan diberbagai percaturan politik pada momentum atau agenda politik secara demokratis dimana kekuasaan masyarakat dijadikan sebagai komoditas politik dalam proses pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Provinsi Maluku Utara sehingga harapan itu belum terwujud. Welhelmina Selfina Beli, 2015. Peran Elite Politik Lokal Dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT. *Politika*, Volume. 6, Nomor.2.

Teori Kimura tentang koalisi elite politik lokal juga menyatakan adanya kesamaan mengenai isu yang digunakan oleh elite politik lokal, seperti isu penguasaan sumber daya ekonomi menjadi aspek penting dalam membentuk koalisi elite di tingkat bawah. penjelasan tersebut bahwa politik sebagai sebuah wadah untuk berkuasa dimana isu - isu dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi dijadikan sebagai instrumen politik sehingga proses pemekaran Kabupten Kepulauan Obi Provinsi Maluku Utara belum ditopang dengan baik oleh para elit lokal oleh karena itu, diperlukannya politik *will* yang mendukung proses pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi agar harapan dan kenyataannya bisa diimplementasikan demi kepentingan masyarakat secara umum. Hilal Ramdhani, 2020. *Dinamika Elite Politik Lokal Mengenai Isu Penguasaan Sumber Daya Ekonomi Dalam Usulan Pemekaran Daerah*. *Jurnal Academia Praja* Volume 3 Nomor 2.

Mobilitas vertikal politik masyarakat Kepulauan Obi sangat dominan oleh kelompok kepentingan, seperti elit lokal, pengusaha, aktivitis, politisi, birokrat, aktivitis LSM dan media lokal dalam menyuarakan isu - isu perubahan politik dan pembangunan sehingga Kepulauan Obi menjadi salah satu sentral dalam otonomi daerah untuk proses pemekaran yang sesuai dengan regulasi, dari aspek luas wilayah secara administratif penduduk dari sisi studi kelayakan secara politik sangat memenuhi syarat.

Dari sisi sosio - kultural kepulauan Obi masyarakatnya sangat majemuk yang terdiri



dari berbagai suku, agama, adat istiadat dan budaya dengan kemajuan ini, daerah ini ketersediaan sumber daya manusia yang sangat memadai dan peran sangat signifikan dalam perubahan pembangunan terutama pemanfaatan sumber daya alam, pertanian dan perikanan sehingga peran masyarakat dan stakeholder dalam proses pemekaran Kepulauan Obi masyarakatnya berpartisipasi sangat dominan. Peran masyarakat sangat dominan dalam proses partisipasi ini mereka selalu mengedepankan demokrasi yang elegan, komunikasi, negosiasi, diplomasi dan selalu menjaga hubungan baik semua pihak termasuk pihak pemerintah daerah. Secara historis isu pemekaran Kabupaten Kota di Maluku Utara salah satu konsepnya adalah 4 R (Rekonsialisasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi, dan Reevaluasi). Dalam konsep 4 R tersebut melahirkan ide dan gagasan setelah masyarakat melakukan perdamaian konflik di Kabupaten Maluku Utara pada tahun 1999 - 2000 sehingga dinamika perubahan politik dan pembangunan pun perubahan sampai sekarang. Hal ini yang meniscayakan masyarakat Kepulauan Obi terus bergerak dan berjuang untuk mendapat dukungan politik dari Pemerintah Pusat agar aspirasi politik masyarakat Kepulauan Obi segera di Realisasikan dengan menjadikan suatu daerah otonom baru (Kabupaten Kepulauan Obi).

2. Kajian Teori

2.1. Definisi Masyarakat

Masyarakat memiliki arti kawan dalam bahasa Inggris yang katanya "*Society*" Masyarakat menurut KBBI artinya sekelompok manusia secara luas yang terikat kepada suatu budaya dan dianggap sama. Kata masyarakat asalnya dari bahasa Arab "*masyarakah*" yang, berarti berkumpul atau bekerjasama. Secara lebih luas masyarakat merupakan suatu jaringan sosial yang terdapat hubungan didalamnya antara berbagai suku yang satu dengan lainnya berhubungan erat dan saling keterkaitan dan membutuhkan. Masyarakat terdiri dari sebanyak-banyaknya manusia dikatakan sebagai masyarakat bukan karena bertempat tinggal di suatu wilayah yang sama, namun konsep masyarakat disini adalah orang yang jumlahnya banyak. Dari beberapa uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa masyarakat merupakan satuan dari manusia yang ruang lingkungannya luas dan terdiri dari banyaknya manusia yang satu dengan lainnya saling bergantung. Ada beberapa ahli yang berpendapat terkait Masyarakat :

1. Syaikh Taqyuddin An-Nabhani beliau merupakan seorang pakar sosiologi yang mengemukakan terkait masyarakat menurutnya masyarakat merupakan sekelompok manusia yang dapat dikatakan sebagai masyarakat jika sudah memiliki pemikiran, rasa, serta suatu aturan yang sama.

2. Paul B Horton dan C.Hunt mereka berpendapat bahwa masyarakat merupakan sejumlah manusia yang berkumpul yang memiliki sifat mandiri dan hidupnya bersama-sama dalam jangka waktu yang dapat dikatakan lama yang berdomisili tertentu yang kemudian memiliki suatu kebudayaan yang sama dalam kelompok. (Anthon Fathanudien, 2015). (Natasya Olivia Ningrum, dkk, 2024. Manusia Sebagai Individu, Keluarga, Masyarakat. Volume 2 Nomor 1. E-ISSN 2986-5395).

2.2. Teori Elit

Perhatian terhadap peran elit politik lokal dianggap penting untuk mengungkap realitas desentralisasi. Teori elit klasik menjelaskan bahwa elit politik merupakan realitas yang ada dalam setiap masyarakat. Menurut Pareto pengertian elit adalah: Dalam setiap



masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Masyarakat terdiri dari 2 kelas: (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*); (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit.

Pendapat hampir sama dikemukakan oleh Gaetano Mosca, yang menjelaskan bahwa: Dimana lapisan elit yang berkuasa atau disebut *classe politica/political elite*. Elit politik ini merupakan kelompok terorganisir yang memiliki kewenangan politik. Kelas elit terdiri dari minoritas terorganisir yang akan memaksakan kehendaknya melalui "manipulasi maupun kekerasan", khususnya dalam demokrasi. Elit politik juga menunjukkan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan, dan menikmati setiap keuntungan dari kekuasaan. Kekuasaan yang mereka miliki tidak berasal dari komunitasnya atau posisi ekonomi, melainkan dari organisasinya yang berhubungan dengan kekuasaan publik negara.

Berdasarkan pendapat Pareto dan Mosca maka karakteristik yang membedakan elit adalah kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik, sekali kelas yang memerintah tersebut kehilangan kecakapannya dan orang-orang diluar kelasnya menunjukkan kecakapan yang lebih, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan diganti oleh kelas penguasa yang baru (sirkulasi elit). Neneng Sobibatu Rohmah, 2018. Elit Dan Pemekaran Daerah; Konflik Antar Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten. ISSN 2442-5958, E-ISSN 2540-8674. Volume.4, Nomor.1.

3. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah riset kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan (Akil Tahir, Sultan, Syamsuddin, & Sabri, 2019). Menurut Sugiyono (2017) "Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah."

Dalam kajian ini, penulis mengadakan penelitian kepustakaan, guna memperoleh data-data dari sumber utama dan pendukung dari literatur-literatur terdahulu, naskah/ manuskrip kuno, buku-buku, skripsi, artikel baik berupa hardcopy atau pun dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diteliti.

Metode penelitan ini menggunakan kualitatif deskriptif, menggambarkan proses penelitian ini dibedakan dari hasil studi pustaka berupa buku, hasil riset lembaga survey dan konsultan politik (Candramukti, 2020). Menurut (Creswell, 2007), penelitian kualitatif berupaya mengkonstruksi realitas sosial, berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa, kunci utamanya terletak pada keaslian, tidak bebas nilai, terikat pada fenomena dan situasi yang diamati, bersifat analisis tematik serta melibatkan peneliti di dalamnya (Sari, 2020). Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mencari pengetahuan atau pemahaman berbagai relasi terkait Analisis Partisipasi Masyarakat dan Peran Elit Politik Dalam Proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Melalui studi teks dan dokumentasi



berita serta artikel yang telah dibaca oleh peneliti secara berulang ulang sehingga peneliti dapat membuat sebuah analisis dan deskripsi (Tahir dkk, 2020).

4. Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Masyarakat dan Peran Elit Politik Dalam Proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi.

Letak Astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Batas wilayah merupakan tanda pemisah antara wilayah geografis yang bersebelahan. Tinggi Wilayah diukur dari permukaan laut (dpl).

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Obi memiliki batas sebagai berikut: Barat: Kecamatan Obi Barat; Timur: Kecamatan Obi Timur ; Utara: Kecamatan Obi Barat dan Kecamatan Obi Utara; Selatan: Kecamatan Obi Selatan. Kecamatan Obi memiliki luas daerah sebesar 910,59 km² yang terdiri atas 9 Desa yaitu Desa Anggai, Sambiki, Jikotamo, Laiwui, Buton, Baru, Akegula, Kawasi, dan Air Mangga. Desa dengan luas daerah terbesar adalah desa Baru sebesar 371,37 km² dan yang terkecil adalah Desa Buton dengan luas 14,16 km².

Jalur Pendidikan di Indonesia terdiri atas 1) pendidikan formal, 2) pendidikan nonformal, dan 3) pendidikan informal yang ketiganya dapat saling melengkapi dan memperkaya (Undang–Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Rumah Sakit adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, biasanya berada dibawah pengawasan dokter/tenaga medis, yang melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap. Poliklinik adalah sarana kesehatan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan, biasanya berada dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi utama sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerja puskesmas maksimal adalah satu kecamatan dan untuk dapat menjangkau wilayah kerjanya, puskesmas mempunyai jaringan pelayanan yang meliputi unit Puskesmas Pembantu (Pustu), unit Puskesmas Keliling (Puskel), dan unit bidan desa/komunitas (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat). Apotek adalah suatu tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/ penjualan obat atau bahan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat yang dikelola oleh tenaga apoteker.

Pada tahun 2023, jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Obi sejumlah 40 sekolah



yang terdiri atas 4 sekolah jenjang Taman Kanak - kanak (TK), 17 sekolah jenjang SD Sederajat, 10 sekolah jenjang SMP Sederajat, dan 9 sekolah SMA Sederajat. Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Obi adalah 6 unit yang tersebar di beberapa desa. 1 unit merupakan Rumah Sakit, 1 unit merupakan Puskesmas Rawat Inap, 1 unit merupakan Puskesmas Pembantu (Pustu), dan 3 unit merupakan Polindes.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 34 (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:

- a. persyaratan dasar kewilayahan; dan
- b. persyaratan dasar kapasitas Daerah.

Secara penerapan dalam pasal 33 ayat tersebut bahwa pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan akan tetapi secara implementasi dari peraturan tersebut tidak sejalan sehingga secara desentralisasi upaya pertanggungjawaban pemerintahan daerah dan demokratisasi lebih tahu apa yang menjadi persoalan dimasyarakat hal ini menunjukkan bahwa implementasi undang - undang belum sejalan dengan aspirasi masyarakat dimana peran elit politik memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan sehingga proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi dari periode ke periode masih menjadi wacana para politisi dan birokrasi. Kepulauan Obi merupakan salah satu daerah yang mempunyai sumber daya alam yang begitu besar di Kabupaten Halmahera Selatan akan tetapi sumber daya alam tersebut bukan dijadikan sebagai sumber kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga peran para elit politik dijadikan strategi dan kebijakan yang bersifat politis dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi sebagai bahan atau produk kepentingan politik lokal dimana demokrasi bukan dijadikan sebagai kepentingan masyarakat tetapi dimanfaatkan dalam kepentingan tertentu dari periode ke periode hal ini menjadi faktor dari penghambat dari proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi sebagai daerah otonom.

Sedangkan didalam Undang - Undang Pemerintah Daerah ayat (2) Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. luas wilayah minimal;
- b. jumlah penduduk minimal;
- c. batas wilayah;
- d. Cakupan Wilayah; dan
- e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Secara eksplisit dari peraturan tersebut bahwa proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang - Undang Pemerintah Daerah dimana secara sosial budaya masyarakat Kepulauan Obi mempunyai corak atau kemajemukan dalam kebutuhan atau kepentingan masyarakat menjadi faktor utama dimana masyarakat mengharapkan dari payung hukum tersebut serta dukungan elit politik dalam mendukung proses pemekaran kabupaten akan tetapi regulasi dan realita tidak sesuai dengan harapan masyarakat, ini mencerminkan bahwa faktor kepedulian dan keprihatinan dari elit politik yang ada di daerah masih minim sehingga pergerakan dan perjuangan masyarakat belum terrealisasi dengan baik dalam proses pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi hal ini



menimbulkan bahwa terjadi kesenjangan sosial dan kebutuhan ekonomi di masyarakat serta kualitas pemerataan pembangunan di Kepulauan Obi belum terakses dengan baik.

Elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal dan elite non politik lokal, elite politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elite politiknya seperti: Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan partai politik (Varma, 1987:2030). Sedangkan Elite Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: Elite keagamaan, Elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan tipe Elite lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar Elite politik maupun elite masyarakat dalam proses pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal. Oleh karena itu, elit politik lokal merupakan suatu golongan atau sekelompok yang mempunyai kekuasaan dan kedudukan mereka dapat mempengaruhi masyarakat melalui latar belakang baik secara formal maupun strata sosialnya dalam jabatan politiknya di eksekutif dan legislatif yang dipilih secara demokratis akan tetapi peran elit politik belum sepenuhnya memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga secara demokrasi prosedural dianggap sebagai ajang kompetisi para elit untuk memimpin negara dan pemerintahan dimana setelah mereka menduduki kursi kekuasaannya maka kepentingan berada ditangan mereka ini mencerminkan bahwa kausalitas dampak politik terhadap masyarakat cukup luas sehingga aspirasi dan perjuangan masyarakat dalam proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi belum terpenuhi secara baik. Masyarakat Kepulauan Obi mempunyai potensi sumber daya alam, pertanian dan perikanan untuk dijadikan sebagai kebutuhan masyarakat akan tetapi kesejahteraan hidup masyarakat belum terpenuhi dengan baik dan pembangunan infrastruktur belum memadai sehingga akses terhadap kebutuhan ekonomi tidak terrealisasikan dengan baik. Kepulauan Obi mempunyai sumber daya alam yang begitu luas sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat namun secara realitas bahwa kekayaan alam di Kepulauan Obi bukan untuk kesejahteraan masyarakat tetapi kepentingan sekelompok elit yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dan diperintah sehingga proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi masih janji di atas janji. Untuk itu, diperlukannya tindakan dan kebijakan politik sesuai dengan kepentingan masyarakat bukan diatas kepentingan pribadi atau kepentingan elit. Sedangkan Elite Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: Elite keagamaan, Elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Didalam penjelasan tersebut elit merupakan seseorang yang menduduki jabatan dan mempunyai pengaruh dilingkup masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan memerintah apa yang dimiliki. Secara desentralisasi otonomi daerah dalam proses pemekaran kabupaten secara riil dimasyarakat bahwa elit politik belum bisa menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat



dimana aspirasi masyarakat lokal yang menjadi landasan tertentu dalam proses pemekaran sering kali hanya dijadikan sebagai justifikasi formal untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu sehingga proses pemekaran kabupaten menjadi ajang dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya. Oleh karena itu, masyarakat kepulauan obi secara pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pelayanan publik belum terakses dengan baik dan ini mengindikasikan bahwa elit politik belum sepenuhnya memperjuangkan hajat hidup masyarakat dalam proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi, ini menandakan bahwa keputusan politik masih dipengaruhi oleh negosiasi politik, lobi kekuasaan, serta pertimbangan elektoral dan ekonomi yang menguntungkan segelintir elit. Untuk itu, proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi perlu adanya pengkajian secara kritis dengan pendekatan yang menenmpatkan keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan dinamika kekuasaan elit, agar pemekaran benar-benar berkontribusi pada kepentingan publik secara meluas buksn menjadi alat kekuasaan segelintir kelompok. Marlinda Irwanti Poernomo, 2021. Komunikasi Elit Politik. Nizamia Learning Center, Ruko Valencia AA-15Sidoarjo. ISBN 978-623-265-631-4.

Menurut Fitria Fitriani, Bert Hofman, dan Kai Kaiser dalam *Jurnal Bulletin Of Indonesia Economic Studies* dengan judul *Unity In Diversity? The Creation Of New Local Goverments In A Decentralising Indonesia* menjelaskan konsep pemekaran muncul didasarkan oleh faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik. Faktor sosial berkorelasi dengan mendapatkan efektivitas pelayanan, faktor ekonomi adalah keinginan untuk mendapatkan suntikan dana, dan faktor politik berkaitan dengan ada pihak elite yang diuntungkan. Didalam penjelasan tersebut bahwa proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi didasarkan oleh faktor sosial dimana secara gegografis daerah, perbatasan, dan wilayah seringkali mengalami kesulitan akses karena terbatasnya jaringan jalan atau transportasi, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya fasilitas pendukung seperti gedung pelayanan yang memadai, jaringan internet yang tidak stabil, sangat dapat mengganggu proses pelayanan, terutama yang berbasis digital, jarak dan waktu tempuh, yang jauh atau waktu perjalanannya yang lama menuju fasilitas publik, misalnya, puskesmas atau kantor pemerintah secara signifikan menurunkan minat masyarakat untuk mengakses layanan publik. Oleh sebab itu, perlu adanya dukungan atau komitmen politik antara masyarakat dan elit politik dalam proses Pemekaran Kabupaten Kepualaan Obi sehingga kepentingan masyarakat lebih diutamakan dibandingkan kepentingan elit atau golongan. faktor ekonomi didasarkan bahwa belum tersedianya pembangunan infrastruktur dengan baik seperti jalan. Infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan yang utama dalam mengakses kebutuhan perekonomian masyarakat untuk itu, perlu adanya dukungan dan harapan secara finansial atau alokasi dana dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sehingga proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi bisa terlaksana sesuai dengan aspirasi masyarakat. faktor politik berkaitan dengan ada pihak elite yang diuntungkan, Pemekaran wilayah seringkali menjadi isu yang kompleks dan multi-dimensi. Salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan adalah adanya kepentingan politik dan ekonomi dari pihak-pihak tertentu. Ada politisi yang melihat pemekaran sebagai peluang untuk meningkatkan pengaruh dan mendapatkan keuntungan, baik itu dalam hal kekuasaan politik maupun ekonomi. Pemekaran bisa membawa dampak positif seperti peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan di daerah. Namun, jika tidak dikelola dengan transparan dan



akuntabel, bisa jadi malah membuka peluang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penting bagi kita untuk mengawasi proses pemekaran dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Pihak-pihak yang berpotensi diuntungkan dari pemekaran wilayah antara lain:

- Politisi lokal yang bisa mendapatkan kekuasaan dan pengaruh lebih besar
- Pengusaha yang bisa mendapatkan proyek-proyek pembangunan di daerah baru
- Elit lokal yang bisa memperluas jaringan dan kekuasaan

Namun, perlu diingat bahwa pemekaran harusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir orang. Shahira Desiamanda, dkk. 2021. Analisis Faktor Pemekaran Nagari Persiapan Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Vol. 3 No. 1, April. E-ISSN : 2721-3730, P-ISSN : 2656-5439.

5. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi merupakan dorongan atau upaya masyarakat dalam meningkatkan kualitas kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang belum memadai dan rentan kendali birokrasi yang lebih pendek. Keinginan kolektif dari masyarakat memberikan legitimasi dasar bagi wacana pembentukan daerah otonomi baru. Tanpa aspirasi dari akar rumput, inisiatif pemekaran mungkin tidak muncul atau sulit dijustifikasi secara moral dan politis. Oleh karena itu, peran elit dapat memainkan peran secara sentral dalam mengartikulasi, memobilisasi, dan memperjuangkan aspirasi tersebut ke tingkat lebih tinggi. Elit memiliki akses terhadap kekuasaan dan jaringan yang diperlukan untuk lobi politik, negosiasi, dan navigasi proses legislasi yang kompleks. Peran mereka seringkali menentukan apakah akan terhenti sebagai isu semata atau berhasil terrealisasi menjadi kebijakan hukum. Untuk itu, perlu adanya dukungan dari para elit politik dalam memperjuangkan kepentingan demokrasi dalam proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi sehingga kedepan wacana otonomi baru bukan memberikan janji politik dan harapan yang belum menentukan tetapi menjadi secara formal sesuai dengan ketentuan Undang - Undang. Semoga kedepan Proses Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi bisa terrealisasi dengan baik dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Chalik, 2017. *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*, ISBN: 978-602-229-766-6. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aji Deni, 2024. *Elite Politik, Demokrasi, & Ketimpangan*. ISBN : 978-623-120-437-0. Eureka Media Aksara, Jawa Tengah.
- Anthony Fathanudien, 2015). (Natasya Olivia Ningrum, dkk, 2024. *Manusia Sebagai Individu, Keluarga, Masyarakat*. Volume 2 Nomor 1. E-ISSN 2986-5395.
- BPS Kabupaten Halmahera Selatan, 2024. *Kecamatan Obi Dalam Angka 2024* ISSN : No Publikasi : 82040.24012.
- Hilal Ramdhani, 2020. *Dinamika Elite Politik Lokal Mengenai Isu Penguasaan Sumber Daya Ekonomi Dalam Usulan Pemekaran Daerah*. Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor



2.

Marlinda Irwanti Poernomo, 2021. *Komunikasi Elit Politik*. Nizamia Learning Center, Ruko Valencia AA-15Sidoarjo. ISBN 978-623-265-631-4.

Neneng Sobibatu Rohmah, 2018. *Elit Dan Pemekaran Daerah; Konflik Antar Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten*. ISSN 2442-5958, E-ISSN 2540-8674. Volume.4, Nomor.1.

Shahira Desiamanda, dkk. 2021. *Analisis Faktor Pemekaran Nagari Persiapan Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat*. Vol. 3 No. 1, April. E-ISSN : 2721-3730, P-ISSN : 2656-5439.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Yuli Safitri, Anwar Efendi Pane, Elly Warnisyah Harahap, 2023. *Analisis Perilaku Politik, Budaya Masyarakat dan Agama diIndonesia*. *Journal of Education Research*, 3(4).